

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga publik sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan publik. Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kemala & Taufik, 2013). Sebagaimana tercantum dalam Q.S Al Baqarah ayat 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.

Dalam ayat tersebut mengandung makna yang dapat dikaitkan dengan organisasi sektor publik yaitu dalam memberikan pelayanan publik hendaknya dilakukan sesuai dengan tujuannya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Instansi pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang membantu perbaikan di segala bidang, baik jangka panjang maupun jangka

pendek. Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dengan adanya instansi pemerintah daerah sangat mendukung dalam peningkatan status setiap daerah. Karena kebutuhan dan kapasitas daerah tidak sama, maka pengelolaan yang dicapai di setiap daerah berbeda (Pujanira & Taman, 2017). Oleh karena itu, dapat mempengaruhi kegiatan serta program yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam menjalankan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah, perhitungan APBD juga merupakan alat analisis laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan laporan fiskal ini memberikan data tentang kelebihan/kekurangan antara hasil pendapatan dan belanja yang dicapai selama periode tertentu (dihitung satu tahun) (Hazmi, 2014). Dari perkiraan tersebut, apakah pendapatan untuk tahun yang direncanakan dapat terpenuhi sebagai pengeluaran yang dapat ditentukan. Disisi pengeluaran, juga dapat memeriksa apakah pendapatan anggaran untuk belanja rutin dan belanja pembangunan sudah berjalan efektif.

Struktur APBD berbasis kinerja yang baru memungkinkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (Solikin, 2016). SiLPA adalah kelebihan pendapatan dan pengeluaran belanja selama satu periode. Menjelang akhir tahun anggaran dan modal dari sisi belanja dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu jenis pendapatan. Keberadaan dan besarnya bergantung pada peningkatan pengeluaran dan penerimaan. SiLPA yang lebih tinggi dapat dicapai pada tahun tertentu jika pengeluaran lebih rendah atau anggarannya efisien. Pada saat penyusunan APBD Pelaksana tidak memberikan modal untuk mendapatkan SiLPA menjelang akhir tahun anggaran bersangkutan karena belum tahu pasti

anggaran SiLPA, masih bersifat sementara. Jumlah SiLPA menjelang akhir tahun anggaran baru dapat diperoleh setelah berakhirnya jangka waktu yaitu 31 Desember. Namun demikian, SiLPA tahun sebelumnya akan muncul sebagai pos penerimaan pembiayaan. Yang terpenting, rencana belanja SiLPA tahun lalu harus sama dengan saat dibuat. Jika pada anggaran tahun lalu tidak terdapat sisa anggaran maka pos SiLPA tahun anggaran sebelumnya akan bernilai kosong.

Salah satu cara untuk menganalisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap SiLPA tersebut (Di & Malang, 2018). Rasio keuangan yang digunakan untuk penilaian SiLPA diantaranya yaitu analisis rasio tingkat pertumbuhan dan analisis rasio tingkat pembiayaan.

Analisis rasio tingkat pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilannya yang telah diperoleh dari waktu ke waktu. Prestasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan salah satu indikasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah (Ekonomi & Dwirandra, 2014). Sedangkan analisis rasio tingkat pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Kusnianingrum & Riduwan, 2016).

Salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggara urusan pemerintah daerah adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Klaten yang mempunyai tugas dalam hal pengelolaan

anggaran. Penulis tertarik meneliti di BAPPEDA Klaten dikarenakan BAPPEDA Klaten memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pengembangan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. selain itu, BAPPEDA merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dibidang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah. Disini menunjukkan bahwa peran BAPPEDA Klaten sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah, sekaligus sebagai penentuan dan penyusunan SiLPA (Raharja, 2016). SiLPA kerap dihadirkan dan dijadikan sebagai bahan permasalahan dikalangan pihak-pihak yang berkepentingan. Ada yang berpendapat bahwa kehadiran SiLPA yang terlalu besar memperburuk kinerja instansi pemerintah, sementara yang lain berpendapat tidak. Semuanya sepertinya tergantung pada penyebab atau faktor pendorong terjadinya SiLPA. Hal ini dinilai berkaitan erat dengan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, sehingga bias tersebut perlu diperjelas. Selain itu dari fenomena tersebut penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh tentang tingkat pertumbuhan dan tingkat pembiayaan SiLPA serta faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA di BAPPEDA Klaten, untuk itu penulis mengambil judul **“Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada BAPPEDA Klaten Tahun Anggaran 2018-2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan dan tingkat pembiayaan SiLPA di BAPPEDA Klaten pada Tahun Anggaran 2018-2020 ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA di BAPPEDA Klaten pada Tahun Anggaran 2018-2020 ?

## **C. Batasan Masalah**

Penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti, agar penelitian ini lebih terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas. Maka batasan masalah penelitian hanya terfokus pada tingkat pertumbuhan dan tingkat pembiayaan SiLPA, serta faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA di BAPPEDA Klaten pada Tahun Anggaran 2018-2020.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan dan batasan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tingkat pertumbuhan dan tingkat pembiayaan SiLPA di BAPPEDA Klaten pada Tahun Anggaran 2018-2020.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA di BAPPEDA Klaten pada Tahun Anggaran 2018-2020.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap penelitian dapat bermanfaat tidak hanya dari sudut pandang teoritis dan praktis, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkannya. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Dapat memberikan manfaat akademik berupa saran pengembangan ilmu dalam manajemen publik dan,
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

### **2. Manfaat Praktis**

Dapat dimanfaatkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) sebagai kontribusi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.